

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH: HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH



DOSEN PENGAMPU



A. MAJID ALI, M.SI

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023/2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH	HTN-610322	HTN	3	6	Januari 2023
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. A. Majid Ali, M.SI		 Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.		 Ifansyah Putra, M.Sos.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi				
	CPL	1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menguasai teori bidang Pemerintah Daerah secara menyeluruh. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan teratur. 4. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data terkait dengan hukum Pemerintah Daerah dengan tepat.			
	CPL-MK Kognitif	Mahasiswa mampu memahami secara mendasar tentang Pemerintah Daerah. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan hubungan HTN dengan disiplin ilmu lain. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan sumber-sumber Hukum Pemerintahan Daerah. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konstitusi dan konstitusionalisme.			
	Afektif	Mahasiswa mampu berperan aktif dalam ruan lingkup Pemerintah Daerah (pusat studi/lab/kelompok belakar			
	Psikomotorik	Mahasiswa mampu mempraktekan materi-materi Pemerintahan Daerah			
Deskripsi Singkat MK	Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori,sertakonsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketetapan pemerintahan daerah				

Capaian Pembelajaran Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Kedudukan dan Obyek hukum Pemerintahan Daerah 2. landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional) a. landasan Konstitusional (Ketentuan pasal 18 UUD 1945). B. landasan 2 operasional: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. Desentralisasi, b. Dekonsentrasi, dan Tugas c. Pembantuan (Medebewind) 4. Sistem otonomi: a. otonomi riil, b. otonomi formal, c. otonomi materiil. 5. Prinsip otonomi daerah: a. seluas-luasnya, b. nyata, c. bertanggung jawab. 6. Pemekaran daerah: a. dasar hukum dalam undang-undang no 9 Tahun 2015, b. penggabungan daerah, c. penghapusan daerah. 7. Perangkat daerah: a. tugas kepala daerah/wakil kepala daerah, b. hak kepala daerah, c. kewajiban kepala daerah 8. Pertanggung jawaban kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 9. Dewan perwakilan rakyat daerah: a. Tugas, b. fungsi, c. hak-hak DPRD, d. hak anggota DPRD 10. Hubungan pusat dan daerah meliputi: a. hubungan kewenangan, b. hubungan keuangan, c. hubungan pengawasan, d. hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan. 11. Sumber pendapatan daerah: a. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah., b. jenis pendapatan daerah, c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12. Pemerintahan desa: a. Pemerintahan desa, b. Badan Permusyawaratan Desa (Tugas dan Fungsi)
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. LITERATUR WAJIB: Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 2. LITERATUR PENUNJANG: <ol style="list-style-type: none"> a. HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 b. Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 c. Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Media Pembelajaran	Proyektor/In Focus, Laptop, Spidol, dan Papan Tulis.
Dosen/ <i>Team Teaching</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. A. Majid Ali, M.Si
Mata Kuliah Syarat	Pemerintahan Daerah

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar	Mahasiswa memahami Sylabus & Kontrak Kuliah	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introdusir Mata Kuliah	1 %
2	Mahasiswa dapat memahami Pengertian, kedudukan dan obyek hukum Pemerintahan Daerah.	Kejelasan dan Pemahaman Pengertian, kedudukan dan obyek hukum Pemerintahan Daerah	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Penjelasan tentang Pengertian, Kedudukan dan Obyek hukum Pemerintahan Daerah	3 %
3	Mahasiswa memahami landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional).	Kejelasan dan Pemahaman landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional).	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional) a. landasan Konstitusional (Ketentuan pasal 18 UUD 1945). b. landasan operasional: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah	3 %

4	Mahasiswa mampu memahami prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Kejelasan dan Pemahaman prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis	Ceramah, Diskusi, & Review	Penjelasan tentang Asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. Desentralisasi, b. Dekonsentrasi, dan c. Tugas Pembantuan (Medebewind)	3 %
5	Mahasiswa mampu memahami dan menguraikan sistem otonomi.	Kejelasan dan Pemahaman menguraikan sistem otonomi.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Resitasi	Sistem otonomi: a. otonomi riil, b. otonomi formal, c. otonomi materiil.	3 %
6	Mahasiswa mampu memahami prinsip otonomi daerah.	Kejelasan dan Pemahaman prinsip otonomi daerah.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, Review Makalah	Prinsip otonomi daerah: a. seluas-luasnya, b. nyata, c. bertanggung jawab.	3 %
7	Mahasiswa dapat memahami pemekaran daerah.	Kejelasan dan Pemahaman pemekaran daerah	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	Pemekaran daerah: a. dasar hukum dalam undang-undang no 9 Tahun 2015, b. penggabungan daerah, c. penghapusan daerah.	3 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					25%
9	Mahasiswa dapat memahami perangkat daerah (perangkat daerah dan SKPD).	Kejelasan dan Pemahaman perangkat daerah (perangkat daerah dan SKPD).	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Penjelasan tentang Perangkat daerah: a. tugas kepala daerah/wakil kepala daerah, b. hak	3 %

					kepala daerah, c. kewajiban kepala daerah	
10	Mahasiswa dapat memahami pertanggung jawaban kepada daerah.	Kejelasan dan Pemahaman pertanggung jawaban kepada daerah.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Penjelasan tentang Pertanggung jawaban kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	3 %
11	Mahasiswa dapat menjelaskan Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan	Kejelasan dan Pemahaman Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Penjelasan tentang Dewan perwakilan rakyat daerah: a. Tugas, b. fungsi, c. hak-hak DPRD, d. hak anggota DPRD	3 %
12	Mahasiswa dapat memahami dan mengerti hubungan pusat dan daerah.	Kejelasan dan Pemahaman mengerti hubungan pusat dan daerah.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Penjelasan tentang Hubungan pusat dan daerah meliputi: a. hubungan kewenangan, b. hubungan keuangan, c. hubungan pengawasan, d. hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan.	3 %
13	Mahasiswa dapat memahami sumber pendapatan daerah.	Kejelasan dan Pemahaman sumber pendapatan	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes:	Ceramah & Diskusi	Penjelasan tentang Sumber pendapatan daerah: a. UU No 33 tahun 2004 tentang	3 %

		daerah.	Quiz Tulisan		Perimbangan keuangan pusat dan daerah. b. jenis pendapatan daerah, c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
14	Mahasiswa dapat memahami pemerintahan daerah di desa.	Kejelasan dan Pemahaman pemerintahan daerah di desa	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Penjelasan tentang Pemerintahan desa: a. Pemerintahan desa, b. Badan Permusyawaratan Desa (Tugas dan Fungsi)	3 %
15	Mahasiswa dapat memahami pemerintahan daerah di desa.	Kejelasan dan Pemahaman pemerintahan daerah di desa	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review (Quiz)	Penjelasan tentang Pemerintahan desa: a. Pemerintahan desa, b. Badan Permusyawaratan Desa (Tugas dan Fungsi)	3 %
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 35%					

Bengkulu, Januari 2023

Dosen Pengampu,



A. Majid Ali, M.Si